

Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendampingan Pendistribusian SKPD PAT Kepada Wajib Pajak Wilayah Kuta

¹I Wayan Cesa Purnamansia*, ²Putu Indah Dianti Putri

¹Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

²Teknik Lingkungan, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Email Corresponding: cesapurnamansia09@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Optimalisasi Pelayanan Publik
Pendampingan
Pendistribusian
SKPD Pajak Air Tanah
Wajib Pajak

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam pemerintahan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam pengenaan Pajak Air Tanah (PAT). Pajak ini dikenakan atas pemanfaatan air tanah oleh individu atau badan usaha dengan tujuan mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan dan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Badung merupakan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik di Bapenda Badung melalui pendampingan proses pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah kepada wajib pajak di wilayah Kuta. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian SKPD pajak air tanah mencakup cuaca hujan, wajib pajak menutup operasional perusahaannya dalam beberapa hari kedepan, dan masalah teknis pada mesin cetak. Kendala-kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan penerimaan SKPD dan sanksi bunga oleh wajib pajak. Pengabdian ini dilakukan meliputi proses penerbitan SKPD, pemilahan dan pengelompokkan sesuai wilayah, pendistribusian SKPD, serta pengarsipan dokumen. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional pelayanan publik, kepatuhan wajib pajak, dan kepuasan wajib pajak. Pengabdian ini berhasil mengoptimalkan pelayanan publik di Bapenda Badung khususnya di bidang penetapan pajak air tanah.

ABSTRACT

Keywords:

Optimization of Public Services
Assistance
Distribution
Groundwater Tax SKPD
Taxpayer

Public service is an important aspect of government to provide convenience and comfort for the community in fulfilling their obligations, especially in the imposition of Groundwater Tax (PAT). This tax is imposed on the utilization of groundwater by individuals or business entities with the aim of regulating the sustainable use of natural resources. The management and collection of groundwater tax in Badung Regency is the responsibility of the Regional Revenue Agency (Bapenda). This service aims to optimize public services at Bapenda Badung through assisting the process of distributing Regional Tax Assessment Letters (SKPD) for groundwater tax to taxpayers in the Kuta area. The obstacles faced in the distribution of groundwater tax SKPD include rainy weather, taxpayers closing their company operations in the next few days, and technical problems with the printing machine. These obstacles can cause delays in the receipt of SKPD and interest sanctions by taxpayers. This service was carried out covering the process of issuing SKPD, sorting and grouping according to region, distributing SKPD, and archiving documents. The results show an increase in public service operational efficiency, taxpayer compliance, and taxpayer satisfaction. This service succeeded in optimizing public services at Bapenda Badung, especially in the field of groundwater tax determination.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya khususnya dalam hal pengenaan pajak (Akib et al., 2023; Mardan, 2023). Salah satu jenis pajak daerah yang signifikan adalah

Pajak Air Tanah (PAT) (Horman et al., 2023). Pajak air tanah merupakan pajak atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah (Fitriani et al., 2023). Pajak air tanah ini dikenakan atas pemanfaatan air tanah oleh individu atau badan usaha, dengan tujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Fadhilatunisa et al., 2023). Pengelolaan dan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Badung merupakan salah satu tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di bidang Pajak Air Tanah (I Putu Santika & Ida Bagus Made Punia Adnyana, 2022). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemungutan, dan pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak dan retribusi (Fernos & Wipi, 2023). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, proses pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah harus dilakukan dengan tepat dan akurat (Effendi et al., 2021).

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bapenda yang menetapkan jumlah pajak yang dikenakan dan yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penggunaan atau pemanfaatan air (Sutardja & Ikhsan, 2023). Wajib pajak merupakan individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah dengan perundang – undangan yang berlaku (Zaikin et al., 2022). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu (Adawiyah et al., 2023). Dalam operasional terkait proses pendistribusian SKPD pajak air tanah seringkali menghadapi berbagai kendala.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah kendala cuaca seperti hujan lebat yang dapat menghambat petugas lapangan untuk mendistribusikan dokumen SKPD kepada wajib pajak. Selain itu, beberapa perusahaan wajib pajak terkadang menutup operasionalnya untuk beberapa hari kedepan dengan alasan tertentu sehingga sulit bagi petugas lapangan untuk mendistribusikan SKPD pajak air tanah tepat waktu dan mengingat jarak dari kantor ke wajib pajak di wilayah kuta lumayan jauh. Kedua kendala tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan wajib pajak dalam penerimaan pajak air tanah dan wajib pajak berpotensi dikenakan sanksi bunga pada saat SKPD pajak air tanah jatuh tempo. Adapun kendala lainnya seperti pada saat proses penerbitan SKPD pajak air tanah terkadang mesin cetak untuk menerbitkan SKPD tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat waktu pada saat proses pendistribusian SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak.

Pada Bapenda Kabupaten Badung terdapat masalah yang lebih spesifik terkait mengenai pendistribusian SKPD pajak air tanah khususnya untuk wajib pajak di wilayah Kuta. Wilayah Kuta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata memiliki jumlah wajib pajak yang cukup banyak dan besar. Berbagai jenis perusahaan yang dimiliki oleh beberapa wajib pajak di wilayah Kuta diantaranya seperti perusahaan hotel, restoran, mall, villa, sampai perusahaan jasa seperti laundry yang dapat terbilang usaha laundry besar yang terdapat di wilayah Kuta. Meskipun hal ini menambah kompleksitas dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah terkait banyaknya wajib pajak yang harus dijangkau, petugas lapangan dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak di wilayah Kuta.

Pendampingan dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah merupakan langkah yang sangat penting terkait optimalisasi pelayanan publik dalam memastikan SKPD pajak air tanah sudah dapat diterima dengan baik dan tepat waktu oleh wajib pajak sekaligus membantu operasional petugas lapangan agar lebih efisien pada saat mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak (Sjarlis et al., 2021). Pendampingan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti menyerahkan dokumen SKPD pajak air tanah, penanganan keluhan atau pertanyaan dari wajib pajak dan menghimbau penerima SKPD pajak air tanah baik yang menerima pegawai, security atau FO (Front Office) untuk menyerahkan langsung kepada staff accounting untuk menyelesaikan transaksi pembayaran sesuai pajak yang dikenakan. Dengan adanya pendampingan yang intensif serta menyeluruh sehingga dapat terselesaikan terkait pendistribusian SKPD pajak air tanah dengan tepat waktu.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian adalah untuk membahas mengenai bagaimana masalah atau kondisi proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah pada Bapenda Kabupaten Badung, bagaimana bentuk dan metode pelaksanaan kegiatan pendampingan proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah di wilayah Kuta dalam mengoptimalkan pelayanan publik pada Bapenda Kabupaten Badung, dan bagaimana hasil dan ketercapaian kegiatan pendampingan proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah di wilayah Kuta dalam mengoptimalkan pelayanan publik pada Bapenda Kabupaten Badung.

II. MASALAH

Proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di Bapenda Kabupaten Badung menghadapi kendala atau permasalahan yang mempengaruhi efisiensi dan ketepatan waktu pada saat mendistribusikan SKPD pajak air tanah. Beberapa masalah yang terutama adalah cuaca yang buruk, seperti hujan lebat yang dapat menghambat petugas lapangan dalam mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah dan tentunya akan menimbulkan dampak kerusakan pada dokumen SKPD pajak air tanah. Selain itu, adapun wajib pajak menutup operasional perusahaannya untuk beberapa hari kedepan sehingga menjadi kendala bagi petugas lapangan untuk mendistribusikan SKPD pajak air tanah, mengingat jarak dari Puspem Badung menuju wilayah kuta lumayan jauh.

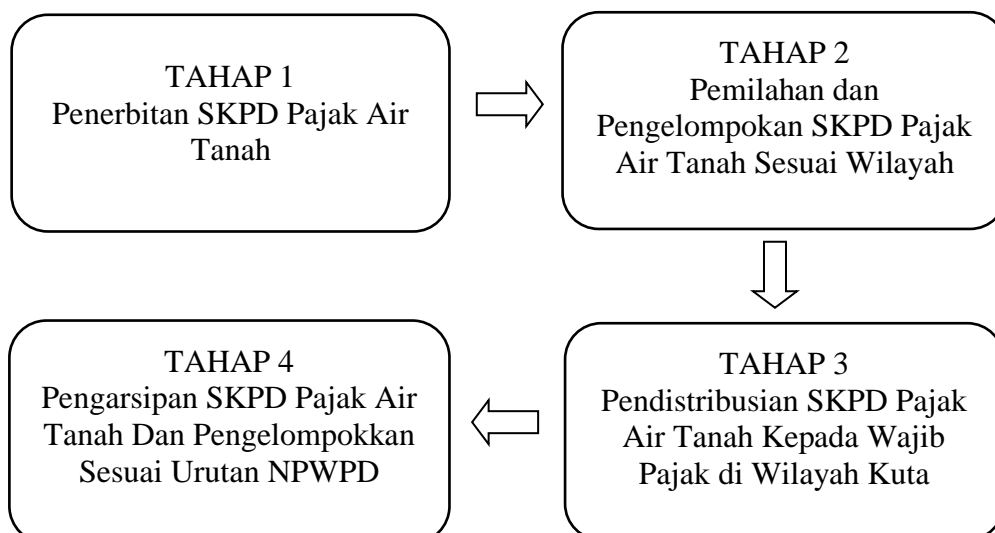
Selain kendala lapangan, adapun masalah teknis seperti mesin cetak yang tidak berfungsi dengan baik sehingga pada saat penerbitan dokumen SKPD pajak air tanah dapat menghambat berlangsungnya pendistribusian dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak. Kendala-kendala ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penerimaan SKPD pajak air tanah oleh wajib pajak yang dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi denda sejumlah 1% pada saat jatuh tempo. Wilayah Kuta yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata terdapat banyak wajib pajak dari berbagai sektor seperti hotel, mall, villa, restoran, club, dan perusahaan jasa laundry besar. Meskipun demikian petugas lapangan harus tetap berupaya untuk menyelesaikan tugas mereka dalam mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak di wilayah Kuta.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

III. METODE

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai metode pelaksanaan kegiatan pengabdian mengoptimalkan pelayanan publik di Bapenda Badung melalui pendampingan proses pendistribusian SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak di wilayah Kuta (Rapita et al., 2020). Berikut langkah-langkah yang diimplementasikan:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah
Langkah awal yang dilakukan yaitu menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
2. Pemilahan dan Pengelompokan SKPD Pajak Air Tanah Sesuai Wilayah
Selanjutnya melakukan pemilahan dan pengelompokan SKPD Pajak Air Tanah sesuai wilayah.
3. Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah Kepada Wajib Pajak di Wilayah Kuta
Setelah dipilah dan dikelompokkan, selanjutnya melakukan pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah kepada Wajib Pajak di wilayah Kuta.
4. Pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah Dan Pengelompokkan Sesuai Urutan NPWPD
Setelah didistribusikan SKPD Pajak Air Tanah diarsipkan dan dikelompokkan sesuai urutan NPWPD.

Prosedur pendampingan ini dapat dikerjakan ulang dengan memulai dari penerbitan SKPD Pajak Air Tanah dan pemilahan dokumen sesuai wilayah, yang kemudian diikuti oleh pendistribusian dokumen ke wajib pajak secara tepat waktu dan akurat. Kegiatan pendampingan mencakup penyerahan langsung dokumen SKPD, penanganan keluhan wajib pajak, dan pemantauan agar dokumen diterima oleh pihak yang berwenang di perusahaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, hasil yang diharapkan dalam optimalisasi pelayanan publik dapat dicapai secara konsisten di berbagai wilayah lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Bapenda Kabupaten Badung khususnya dalam pengenaan Pajak Air Tanah (PAT), berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan proses pendistribusian SKPD pajak air tanah terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Pelayanan publik yang efisien adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus kepatuhan atas pajak oleh wajib pajak (Stiami, 2021). Namun kendala operasional yang sering dihadapi seperti cuaca hujan dan masalah teknis pada mesin cetak pada saat penerbitan yang dimana memerlukan perhatian khusus dan solusi yang efektif. Pendampingan pada saat mendistribusikan SKPD pajak air tanah tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa SKPD pajak air tanah diterima oleh wajib pajak melainkan dapat membantu memahami dan memenuhi kewajiban pajak dari wajib pajak (Bagaswara et al., 2020). Proses ini mencakup penyerahan SKPD pajak air tanah, memberi solusi terhadap keluhan wajib pajak, serta menghibau dengan tegas terhadap penerima bahwa menyampaikan SKPD pajak air tanah kepada pihak yang mengatur keuangan perusahaan. Berikut metode pelaksanaan kegiatan dan hasil ketercapaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai langkah – langkah dalam metode pelaksanaan kegiatan:

1. Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah
Proses penerbitan SKPD pajak air tanah dimulai dengan pengumpulan data penggunaan air tanah dari wajib pajak. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi Bapenda Kabupaten Badung melalui aplikasi Smartgov untuk menghasilkan format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kemudian di bidang penetapan menetapkan jumlah pajak air tanah yang dikenakan sesuai dengan penggunaan aktual. Kemudian dokumen SKPD pajak air tanah diterbitkan menggunakan mesin cetak khusus serta menggunakan material kertas continuous form 3 ply yakni satu set kertas surat yang terdiri dari 3 lembar dengan warna berbeda.



Gambar 3. Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah



Gambar 4. Bukti SKPD Pajak Air Tanah

2. Pemilahan dan Pengelompokan SKPD Pajak Air Tanah Sesuai Wilayah

Setelah SKPD pajak air tanah diterbitkan, dokumen-dokumen SKPD pajak air tanah dipilah dan dikelompokkan berdasarkan wilayah wajib pajak sekitaran Kabupaten Badung. Untuk di wilayah Kuta yang memiliki jumlah wajib pajak yang banyak kurang lebih 500 wajib pajak, tentu pemilahan ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam distribusi. Dokumen dibagi dan dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup wilayah seputaran Kabupaten Badung. Pemilahan yang tepat membantu petugas lapangan dalam merencanakan rute distribusi yang optimal dan memastikan seluruh wajib pajak menerima SKPD pajak air tanah tepat waktu.



Gambar 5. Pemilahan dan Pengelompokan SKPD Pajak Air Tanah

3. Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah Kepada Wajib Pajak di Wilayah Kuta

Pendistribusian SKPD pajak air tanah dilakukan oleh petugas lapangan yang telah dibekali dengan rute yang telah dioptimalkan berdasarkan pemilahan sebelumnya. Pada saat distribusi SKPD pajak air tanah

sering kali menghadapi beberapa kendala yaitu seperti hujan dan wajib pajak tutup. Namun beberapa kendala tersebut tidak menghalangi petugas lapangan untuk menuntaskan tugasnya. Dengan 3 sampai 4 hari dapat terselesaikan untuk pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah Kuta.



Gambar 6. Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah

4. Pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah Dan Pengelompokkan Sesuai Urutan NPWPD

Setelah distribusi selesai, proses pengarsipan dilakukan untuk menyimpan salinan SKPD pajak air tanah sesuai dengan urutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kegiatan pengarsipan dilakukan dengan mencontreng urutan NPWPD dari SKPD pajak air tanah untuk memastikan semua SKPD pajak air tanah aman sebelum diarsipkan. Pengarsipan yang terstruktur memungkinkan dipermudah mengakses dokumen saat diperlukan.



Gambar 7. Pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah

Secara umum, hasil ketercapaian kegiatan dapat diukur dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah kegiatan pengabdian, menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Putri, 2024). Keberhasilan kegiatan pengabdian ini dirinci atau diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Ketercapaian Kegiatan

Indikator	Sebelum Kegiatan Pengabdian	Setelah Kegiatan Pengabdian
Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah	Dilakukan sampai menghabiskan waktu sehari-hari	Terselesaikan hanya 2 hari

Tingkat Kesalahan Pada Saat Pencetakan	Sering terjadi kesalahan dalam proses pencetakan	Tingkat kesalahan menurun dan meningkatkan efisiensi operasional
Solusi Permasalahan Mesin Cetak	Sering terjadi kerusakan pada fisik SKPD pajak air tanah	Berjalan dengan lancar minim kerusakan pada fisik SKPD pajak air tanah
Kualitas Layanan Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah	Masih standar Menyelesaikan distribusi dalam 4 hari	Meningkat secara optimal Dapat terselesaikan dalam 3 hari

Hasil dan ketercapaian kegiatan pendampingan proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah Kuta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi operasional pelayanan publik oleh Bapenda Kabupaten Badung khususnya di bidang penetapan pajak air tanah. Dengan pengumpulan data yang lebih sistematis dan penerapan aplikasi Smartgov, proses penerbitan SKPD pajak air tanah menjadi lebih cepat, akurat dan dapat dipastikan bahwa jumlah pajak yang dikenakan sesuai dengan penggunaan aktual. Pemilahan dan pengelompokan SKPD pajak air tanah berdasarkan wilayah terutama di wilayah Kuta yang memiliki jumlah wajib pajak yang banyak membantu petugas lapangan merencanakan rute distribusi yang optimal.

Meskipun menghadapi beberapa kendala seperti cuaca hujan dan ada wajib pajak menutup operasional perusahaannya untuk beberapa hari, namun petugas lapangan tidak menjadikannya alasan untuk menghambat tugasnya dalam mendistribusikan SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak dan dapat menyelesaikan dalam waktu 3 sampai 4 hari. Pengarsipan yang dilakukan setelah distribusi juga telah terstruktur dengan baik, menggunakan urutan NPWPD untuk memastikan semua dokumen SKPD pajak air tanah tersimpan dengan aman dan mudah diakses saat diperlukan. Secara keseluruhan, upaya pendampingan dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah Kuta berhasil mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kepuasan wajib pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pengenaan pajak air tanah di Kabupaten Badung.

Keunggulan dari kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan ini berhasil meningkatkan efisiensi dari awal proses yaitu dari penerbitan, pemilahan, pendistribusian, dan pengarsipan dokumen SKPD Pajak Air Tanah. Kelemahan dari kegiatan yang dilakukan yaitu kendala operasional seperti cuaca buruk dan masalah teknis pada mesin cetak sering kali menghambat proses penerbitan sehingga bisa berakibat proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah menjadi terhambat.

Terdapat saran yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di masa depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, disarankan untuk memperbarui dan merawat mesin cetak secara berskala untuk mengurangi resiko gangguan teknis yang dapat memperlambat penerbitan SKPD pajak air tanah. Kedua, pengembangan teknologi distribusi seperti aplikasi mobile yang dapat mempermudah komunikasi antara petugas lapangan dan wajib pajak serta memantau status distribusi secara real-time bisa menjadi solusi untuk mengatasi kendala cuaca dan operasional perusahaan. Ketiga, perlu adanya pelatihan tambahan bagi petugas lapangan untuk menangani berbagai situasi darurat dan masalah distribusi dengan lebih efektif. Terakhir, Bapenda Kabupaten Badung dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan koordinasi dengan perusahaan wajib pajak termasuk pemberitahuan awal mengenai distribusi untuk meminimalkan gangguan operasional. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pendistribusian SKPD pajak air tanah serta memperbaiki pelayanan publik secara keseluruhan.

Data-data hasil kegiatan pengabdian yang diperoleh dari proses penerbitan, pemilahan, pendistribusian, dan pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah menjadi landasan utama dalam melakukan analisis mendalam terhadap efisiensi dan efektivitas sistem yang ada. Melalui pembahasan yang komprehensif terhadap data-data tersebut, peneliti berhasil mengidentifikasi berbagai kendala, keunggulan, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah Kuta telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Bapenda Kabupaten Badung. Dengan

menerapkan sistem yang lebih terstruktur mulai dari penerbitan menggunakan aplikasi Smartgov, pemilahan berdasarkan wilayah, hingga distribusi yang lebih tepat waktu, proses ini mengalami percepatan dan akurasi yang signifikan. Meskipun menghadapi tantangan seperti cuaca buruk dan operasional perusahaan, petugas lapangan berhasil menyelesaikan distribusi dalam waktu 3 hingga 4 hari, serta memastikan pengarsipan dokumen yang baik. Secara keseluruhan, pendampingan ini telah berhasil mengoptimalkan pelayanan publik, memperbaiki kepuasan wajib pajak, dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik di Kabupaten Badung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Praktek Kerja Lapangan. Dukungan dan bimbingan yang diberikan sangat berarti dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Akib, M., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126–138. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2238>
- Bagaswara, I., Alkautsar, M., & Harahap, E. F. (2020). Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 50. <https://doi.org/10.52434/jwa.v5i2.1692>
- Effendi, F., Ratnawati, V., & Basri, Y. M. (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 95–116. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10394>
- Fadhilatunisa, D., Saputri, D. A., & WA, A. R. (2023). Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 4(1), 22–28.
- Fernos, J., & Wipi, I. (2023). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Volume, 3, 647–661.
- Fitriani, F., Yusni, Y., & Sulistyarningsih, S. (2023). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.56341/aafj.v1i2.209>
- Horman, F., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 25–36.
- I Putu Santika, & Ida Bagus Made Punia Adnyana. (2022). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Journal of Applied Management Studies*, 3(2), 173–190. <https://doi.org/10.51713/jamms.v3i2.54>
- Mardan, M. . (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kantor Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon. *Hipotesa*, 17(1), 1–11. <https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/74>
- Putri, P. I. D. & Sudiarta, I. K. (2024). Modernisasi Irigasi: Upaya Perluasan Akses Terhadap Teknologi Informasi dalam Mendukung Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. *Abdimas Galuh*, 6(1), 348-359.
- Rapita, D. D., Sukriono, D., Ratnawati, N., Saputra, M., Desa, P., Publik, P., Desa, P., Governance, L., Yudisial, K., Pajak, D., & Indonesia, B. (2020). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendampingan Pemanfaatan Website Pemerintah Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi (JPDS)*, 3(2), 61–67.
- Sjarlis, S., Abidin, Z., Dau, A. U., Khusus, A., Jumlah, D. A. K., Perimbangan, D., Hasil, B., Umum, D. A., Khusus, A., Hasil, B., & Hasil, B. (2021). Optimalisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Usaha Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar). 2(4), 63–77.
- Stiami, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 11(2012), 492–510.
- Sutardja, F. S., & Ikhsan, N. M. (2023). Kebijakan Pajak Daerah Dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah

Terhadap Ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah. *Jurnal Manajemen Jayanegara*, 15(1), 43–53.
<https://jurnal.stiekn.ac.id/index.php/jmj/article/view/226%0Ahttps://jurnal.stiekn.ac.id/index.php/jmj/article/download/226/213>

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>